



RILIS

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI I DPR RI
KE NUSA TENGGARA BARAT (NTB)
23 – 25 JANUARI 2020**

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 23 - 25 Januari 2020. Dalam Kunspek tersebut Komisi I DPR RI melakukan peninjauan ke Desa Wisata Mekarsari dan Sukarara, Lombok Tengah, serta mengadakan pertemuan dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Wakil Bupati Loteng, Mitra Penyedia, dan Stakeholder terkait lainnya dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait *progress report* program BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika di NTB.

Kunspek Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H. Bambang Kristiono (HBK) menyampaikan harapannya agar Kunspek kali ini dapat mendorong BAKTI untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan harapan bersama.

“Saya kira salah satu maksud dan tujuan kami datang ke sini adalah memastikan dulu ya, bahwa layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang kami wakili bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan”, ujar HBK.

Saat mengunjungi Desa Mekarsari, Anggota Komisi I DPR RI memberikan masukan kepada Tim BAKTI soal area pembangunan *Base Tranceiver Station* (BTS) yang dinilai tidak tepat. Anggota Komisi I DPR RI menyarankan agar pemasangan BTS ditempatkan pada area pegunungan yang dapat menjangkau hingga radius 5 kilometer (jangkauan maksimum BTS BAKTI). Komisi I DPR RI menyampaikan masukan lanjutannya terkait sisi penyediaan infrastruktur telekomunikasi, terutama dalam rangka menyambut persiapan MotoGP 2021 yang dinilai jauh dari harapan.

12 Desa dari 15 Desa *blank spot* di Lombok Tengah, berada di kawasan Mandalika (Area yang akan menjadi tuan rumah MotoGP 2021).

“Kita mengetahui bersama bahwa tidak lama lagi NTB ini, khususnya Pulau Lombok akan menyelenggarakan *event* yang bersifat internasional, kita datang ke sini, Komisi I DPR RI ingin juga memastikan bahwa layanan kepada tamu-tamu asing dan lokal yang datang diperhelatan akbar tersebut, bisa juga berjalan seperti yang diharapkan,” tambah HBK mewakili suara Anggota Tim Kunspek Komisi I DPR RI.

Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI, Fadhilah Mathar menyampaikan komitmennya dalam membangun Indonesia merdeka sinyal 2020. Di Lombok Tengah, terutama di daerah Mandalika, BAKTI akan membangun BTS kepada 12 desa dari 15 desa yang tercatat *blank spot*. 12 desa *blank spot* ini harus diberikan sinyal telekomunikasi yang memadai karena akan menjadi tuan rumah MotoGP 2021.

“kami sangat memohon bantuan Bapak (Pimpinan Daerah) untuk mengusulkan lokasinya (*blank spot area*) dimana, kami membutuhkan koordinatnya sehingga akan mudah untuk dibangun. Baik pak, dari 15 ini, kami butuh koordinat dimananya akan kami pasang BTS,” janji Fadhilah dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Kunspek Komisi I DPR RI di Desa Sukarara, Kamis (23/1/2019).

Berikut adalah nama-nama desa yang dimaksud berdasarkan catatan Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalufathul Bahri, Selong Belanak, Lantan, Aik berik, Bebuag, Benang Setokel, Mertak, Mawun, Banyu Urip, Prabu, Montong Ajan, Montong Sapah, Batu Jangkih, Pandan Tinggang, Bangket Parak, dan Steling.

Tim Kunspek Komisi I DPR RI sepakat untuk memanggil Menteri Kominfo dengan para penyedia jaringan telekomunikasi (*Indonesian telecommunication provider*) seperti Telkomsel, XL dan lain-lain, untuk mendengarkan persiapan terkait *event* internasional MotoGP 2021 di Mandalika, Lombok Tengah yang hanya tersisa 1 (satu) tahun.

“Kita bisa bayangkan kalau tamu 200.000 itu kumpul di sini, pasti akan tinggal di 12 desa itu, posisi jaringannya *blank spot*, ini menurut saya satu kesalahan, maka dari itu saya kira tolong disepakati teman-teman DPR, kita perlu memanggil Kominfo dengan jaringan telekomunikasi yang ada, Telkomsel, atau XL untuk bersama-sama kita keroyokan,” tutup salah seorang Anggota Tim Kunspek Komisi I DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan BAKTI di Desa Sukarara.*

Lombok, 25 Januari 2020
Tim Kunker Spesifik Komisi I DPR RI ke NTB